

IMPLEMENTASI KERJASAMA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DAN PT. TELKOM DALAM MEMBANGUN SEMARANG *SMART CITY*

Oleh: Yunita Fitri

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk membahas kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Telkom, mengkaji realisasi implementasi kerjasama tersebut dalam menghasilkan program-program terkait pembangunan Semarang *smart city*. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan kerjasama tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara, yang dilakukan dengan informan atau *key person*, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen, arsip, atau sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yang dilakukan dengan memahami data yang diperoleh dari informan dan menarik pernyataan yang relevan, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan atas hasil data penelitian berupa kata-kata dan kalimat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT. Telkom dalam membangun Semarang *smart city*, berjalan dengan baik dan telah mampu menghasilkan program-program yang berdayaguna dan inovatif dalam pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam melaksanakan program-program tersebut keterlibatan birokrat tidak dapat dipisahkan, namun belum seluruh birokrat Kota Semarang mampu mengoperasionalkan teknologi dengan baik, diharapkan pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan atau program-program pembekalan bagi para birokrat sehingga dapat menunjang efektifitas pelaksanaan program yang telah dibangun.

Kata Kunci: Implementasi, Kerjasama, *Smart City*, pelayanan public

PENDAHULUAN

Melalui pelaksanaan otonomi daerah, yang ditetapkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam pembagian tugas. Termasuk didalamnya adalah urusan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terjadi, berlangsung, dan berdampak dalam kehidupan kota. Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi salah satu kewajiban yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, bentuk nyata pelayanan publik yang dapat langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat adalah diselenggarakannya pembangunan, pemerintah daerah berupaya melaksanakan pembangunan untuk mencukupi fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana publik, yang dapat menunjang kegiatan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk membentuk pelayanan yang baik, dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik pula, atau yang biasa disebut dengan *Good Governance*. Sebuah konsep penyelenggaraan peran pemerintah dengan sistem yang lebih baik. Kaitannya *good governance* dengan peningkatan pelayanan publik adalah hubungan proses dan output atau hasil, dimana *good governance* sebagai sebuah konsep menjadi proses dan peningkatan pelayanan publik menjadi *output* atau hasil dari pelaksanaan proses tersebut (Nurcholis, 2005:300).

Pemerintah dapat melaksanakan penyederhanaan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan (dikutip dari Pasal 349 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Gagasan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi mengembangkan bentuk pelayanan publik

lebih jauh lagi dengan model strategis dan visioner. Perkembangan zaman diikuti pula dengan perkembangan teknologi yang pesat, kemajuan teknologi pun tak urung menjadi suatu terobosan baru, yang digunakan oleh kota untuk memberikan layanan yang semaksimal mungkin bagi penduduknya, sehingga muncul konsep perkembangan kota berbasis pemanfaatan teknologi, yaitu konsep *smart city*.

Praktik *good governance* dalam peningkatan pelayanan publik, dalam hal ini melalui penerapan pembangunan kota sebagai *smart city*, tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyedia layanan yang dominan dan memegang kendali. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemerintah tidak terbantahkan dapat menimbulkan kegagalan pemerintah (*government failure*) dalam proses penyelenggaraan pelayanan yang maksimal. Strategi-strategi yang diambil pemerintah dalam pemenuhan pelayanan publik adalah pembagian kewenangan dan peran dari pemerintah kepada swasta untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sebagai pihak ketiga, atau yang disebut dengan istilah *Public Private Partnership* (PPP).

Kota Semarang sebagai daerah otonom, berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari prinsip *good governance*. Termasuk dalam penyediaan pelayanan publik yang prima melalui penyediaan fasilitas layanan dasar bagi masyarakat, Pemerintah Kota Semarang menerapkan strategi *public private partnership* untuk menyediakan berbagai layanan publik di Kota Semarang, salah satunya adalah penerapan konsep *smart city* untuk membangun

kota yang pintar dalam pelayanan. Sebagai salah satu contoh yang menyelenggarakan praktek *public private partnership* adalah BUMN PT Telkom.

Program *smart city* di Kota Semarang sebenarnya telah mulai dirintis dari tahun 2013, sebagai bagian dari peringatan ulang tahun ke-466 Kota Semarang, yang sekaligus ditandai dengan peresmian hubungan kerjasama antara pemerintah kota Semarang dengan PT. Telkom melalui penandatanganan MoU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan program *Digital Government Services* melalui Semarang *Smart City*, yang ditandatangani oleh Hendrar Prihadi yang kala itu menjadi PLT Walikota Semarang (Tabloid Simpang Lima, 2013).

Menandai deklarasi Semarang *Smart City* tersebut dilangsungkan pula peresmian akses internet gratis (*WIFI*) oleh PT. Telkom di beberapa titik jalan protokol sebagai salahsatu pelayanan koneksi dan informasi, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menunjang produktivitas yang tinggi, selain itu layanan jaringan *WIFI* tersebut dapat digunakan masyarakat untuk berhubungan langsung dengan pemerintah kota, baik pengaduan maupun pengaksesan informasi-informasi.

Selain pembangunan fasilitas guna mengembangkan pelayanan informasi publik dan pengembangan komunitas digital, Dinas Kominfo bersama PT. Telkom juga membangun fasilitas gedung guna kegiatan *e-commerce*, dimana fasilitas ini dibangun berfokus pada pengembangan kegiatan UMKM di Kota Semarang. Telkom berperan sebagai penyedia tempat dan memfasilitasi tempat tersebut, kemudian Dinas Kominfo berperan sebagai pengelola yang

mengeoperasionalkan *e-commerce* tersebut. Dimana kegiatan bagi UMKM di tempat tersebut adalah pameran produk hasil UMKM serta pembinaan untuk pelaksanaan penjualan secara online melalui *e-commerce* tersebut.

Dari uraian diatas hubungan kerjasama yang terjalin tersebut dinilai akan menghasilkan banyak manfaat bagi pelaksanaan program *smart city* secara khusus dan pembangunan Kota Semarang secara keseluruhannya, serta memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bekerjasama. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Telkom sebagai upaya untuk mewujudkan Semarang *Smart City*.

Metodologi

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi dokumen. Informasn pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, Kepala Bidang Bappeda Kota Semarang, dan Senior Accountant Government Manager PT. Telkom

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008:146-147) definisi implementasi kebijakan publik adalah merupakan tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional

dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat berbagai macam model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, pada dasarnya model implementasi dapat dibuat pemetaannya ke dalam dua jenis pemilihan, pemilihan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-downer*) dan dari “bawah ke atas” (*bottom-upper*). Model *top-downer* mudahnya berupa pola yang dikerjakan pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kebijakan terkait terorisme, sebaliknya *bottom-upper* bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat, seperti kebijakan yang tidak secara langsung berkenaan dengan keamanan nasional.(Nugroho,2014:678)

Dengan model implementasi dapat dipahami faktor-faktor atau variabel yang saling terkait dalam proses implementasi yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut. menurut model pendekatan analisis implementasi yang dikemukakan oleh George Edward terdapat 4 faktor yang berdampak langsung terhadap keberhasilan ataupun kegagalan proses implementasi kebijakan.(Winarno. 2008:116) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kerjasama Pemerintah dan Swasata (*Public Private Partnership*)

Bovaird mendefinisikan kemitraan pemerintah dan swasta secara sederhana sebagai “pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan diatas yang diatur dalam setiap kontrak antara satu organisasi disektor publik dengan organisasi diluar sector publik” (Dwiyano, 2012:252).

Dari definisi singkat diatas dapat diartikan bahwa kemitraan pemerintah dan swasta merupakan hubungan mempekerjasamakan asset dan keahlian yang dimiliki masing-masing sektor guna menyediakan pelayanan bagi publik, yang memberikan hasil serta resiko timbal balik yang ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak, bahwa hubungan kemitraan ini lebih dari sekedar sebuah kontrak kerja, bahwa pihak yang menjalin kemitraan saling berkomitmen untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan yang diyakini bersama, dan memiliki kepedulian melebihi apa yang tertulis didalam kontrak.

PEMBAHASAN

1. Proses Implementasi Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan PT.

Telkom dalam Membangun *smart city*

kerjasama merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, dalam melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung *smart city*, dibutuhkan jumlah anggaran yang tidak sedikit. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Semarang melakukan kerjasama dengan harapan, keterlibatan mitra-mitra tersebut dalam pembangunan

smart city dapat membantu tercapainya pembangunan *smart city* secara efektif dan efisien, dengan kontribusi sumberdaya yang dimiliki oleh mitra terkait.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Telkom dalam membangun *smart city* dipayungi oleh MoU yang telah disepakati pada tahun 2013 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan program *Digital Governnet Services* melalui Semarang *Smart City*, MoU merupakan kerangka besar dari bingkai kerjasama yang dijalin, dari MoU kemudian kerjasama diteruskan dalam bentuk PKS, yang lebih rinci membahas per proyek kerjasama yang dilaksanakan.

Melalui proses kerjasama tersebut, pemerintah meinginkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan pelayanan tersebut, dengan mode pelayanan yang lebih praktis dan efektif, masyarakat dapat merasakan manfaat pelayanan dalam membantu mereka meningkatkan kualitas hidup, serta mengatasi kebutuhan masyarakat sehingga mendorong tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam kerjasama tersebut adalah Walikota Semarang, Bappeda, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, Bagian Hukum Setda Kota Semarang dan PT. Telkom.

Realisasi Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan PT. Telkom

1. Pengadaan WIFI, merupakan realisasi kerjasama dari MoU yang ditandatangani pada tahun 2013, oleh Walikota Semarang dan perwakilan PT. Telkom. Untuk menyediakan jaringan di kota Semarang dibangun

sarana wifi gratis di area-area publik, dalam membangun *smart city*, Pemerintah Kota Semarang melakukan evolusi pada sistem pelayanan, dengan banyak menciptakan aplikasi dan sistem pelayanan *online*, sehingga perluasan jaringan dengan membangun WIFI pada area publik untuk digunakan secara gratis oleh masyarakat, merupakan langkah penting untuk memfasilitasi masyarakat secara penuh dalam pelayanan, dengan memberikan kemudahan akses pada masyarakat.

2. PIP (Pusat Informasi Publik) merupakan proyek kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Telkom untuk membangun fasilitas pelayanan terpadu terkait informasi kepada masyarakat, PIP dibangun dengan tujuan transparansi dan efisiensi akses informasi oleh masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat akan informasi dan transparansi kinerja pemerintahan dapat diperoleh melalui PIP. Ini sebagai bentuk reformasi birokrasi meminimalisir alur operasional dalam memberikan informasi. Dimana masyarakat yang memiliki kepentingan atau ingin mengetahui informasi terkait proses pemerintahan dan kinerja pemerintah, dapat datang ke lokasi PIP yang dilengkapi sarana untuk mengakses informasi dan internet.
3. SDK (Semarang Digital Kreatif) merupakan proyek kerjasama Pemerintah Kota Semarang yang memfasilitasi komunitas digital di Kota Semarang, melalui fasilitas SDK pemerintah ingin meningkatkan produksi digital Kota Semarang, agar dapat bersaing dengan daerah lain. Untuk mendukung *smart city*, peningkatan kreatifitas dibidang digital dan

meningkatkan kemampuan serta minat masyarakat dalam digitalisasi, pemerintah mendirikan SDK untuk mendorong hal tersebut terjadi.

Kerjasama SDK berlaku selama 5 tahun sesuai yang tertera dalam PKS, terhitung dari diberlakukannya perjanjian kerjasama pada bulan September tahun 2016. Dalam kerjasama Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang terlibat sebagai pengelola dan penyedia anggaran, kerjasama pembangunan SDK merupakan kerjasama dengan sistem Sewa, dimana SDK menggunakan gedung bangunan milik PT. Telkom, yang dibayar sewa oleh Pemerintah Kota Semarang.

4. Fasilitas *E-commerce*, merupakan kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Telkom yang memfasilitasi kelompok UKM yang ada di Kota Semarang, proyek kerjasama ini sebagai bentuk pembangunan sektor ekonomi, untuk menciptakan kondisi *smart economy* sebagai salah satu pondasi *smart city*. *E-commerce* ditujukan untuk mempermudah perluasan jaringan dan jangkauan pasar oleh pengusaha UKM, dengan menghimpun para pelaku UKM dalam wadah *E-commerce*. Melalui *E-commerce* pelaku UKM dibantu untuk mendapatkan pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi dalam bisnis, proses pemasaran melalui internet secara *online*, yang dapat diperoleh secara gratis oleh pelaku UKM Kota Semarang.
5. *Fiber optic* merupakan sebuah alat transmisi data pada jaringan komputer, yang dapat mengirimkan dan meneruskan data dalam jumlah besar secara cepat, dan dapat menghubungkan data-data antar informasi, selain itu *fiber optic* dapat menjaga stabilitas jaringan, sehingga *fiber optic* banyak

digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan tingkat menengah ke atas. Seperti instansi pemerintahan yang menuntut adanya struktur jaringan yang stabil dan cepat. Untuk mewujudkan *smart city* dalam tata kelola pemerintahan Kota Semarang, diperlukan jaringan yang stabil dan dapat menghubungkan antar instansi pemerintah. untuk menjalankan pemerintahan yang efektif

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Menurut model pendekatan analisis implementasi yang dikemukakan oleh George Edward terdapat 4 faktor yang berdampak langsung terhadap keberhasilan ataupun kegagalan proses implementasi kebijakan, adapun 4 faktor tersebut yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kerjasama adalah sumber daya, kendala sumberdaya manusia disebabkan karena aparat pemerintahan masih belum terbiasa dengan paradigma baru, dan masih kagok dengan paradigma baru yang berusaha diterapkan. Kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan perangkat IT menjadi faktor utama para aparat pemerintahan masih kagok dalam memberikan pelayanan dengan metode baru melalui perangkat elektronik. Sehingga hal tersebut menghambat efektifitas penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi dalam mewujudkan *smart city*. Keengganan untuk berubah tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang lebih pelik, munculnya rasa enggan tersebut menjadikan sumberdaya manusia tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, kemudian muncul sikap tidak peduli dan kurang sigap dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun faktor komunikasi telah berjalan dengan baik, melalui penyelenggaraan rapat kordinasi setiap bulan antara para implementor, yang menjadi ajang, proses evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan yang berlangsung. Disposisi impelmentor dalam implementasi kerjasama membangun Semarang smart city, sangat berkomitmen dalam penyelenggaraan kerjasama untuk membangun smart city tersebut. Kesadaran dan kemauan tersebut muncul atas kesadaran untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas, serta keinginan yang besar untuk menerapkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai instansi sektor publik kesadaran dan kemauan tersebut sudah menjadi hal dasar yang harus dimiliki oleh implementor. Senada dengan Pemerintah Kota Semarang, disposisi yang tinggi juga ditunjukkan oleh PT. Telkom dalam upaya pembangunan Semarang *smart city* ini, PT. Telkom tidak hanya mengejar keuntungan dalam kontribusinya membangun Semarang smart city.

Adapun faktor struktur birokrasi Pembentukan tim oleh Walikota Semarang untuk menyelenggarakan pembangunan Semarang *smart city*, membantu menyederhanakan struktur birokrasi yang terlibat dalam proses pembangunan. Penyerahan tugas yang jelas dan pembagian wewenang yang terkoodinir dengan baik mejadikan proses implementasi kebijakan untuk membangun smart city menjadi efektif. Dinas yang menjadi implementor diberikan kewenangan luas untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih ide dan rencana pembangunan, selama Dinas mengikuti kerangka besar pembangunan

berkelanjutan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dapat terimplementasi dengan baik. Serta garis kordinasi yang jelas antar implementor dan pihak ketiga dalam menjalankan kerjasama dan melaksanakan proses pembangunan sangat membantu terwujudnya proses implementasi yang baik.

PENUTUP

Simpulan

Penyelenggaraan kerjasama dengan PT. Telkom oleh pemerintah sebagai solusi atas keterbatasan yang dimiliki pemerintah baik dalam ketersediaan anggaran, maupun keterbatasan sumber tenaga pekerja. PT. Telkom membiayai program kerjasama melalui CSR dan program hibah, sehingga dapat meringankan beban APBD Kota Semarang. Selain dana PT. Telkom membantu kekurangan pemerintah akan tenaga professional yang ahli dalam bidangnya, karena belum seluruh penyelenggara birokrasi di Pemerintahan Kota Semarang fasih menggunakan perangkat teknologi.

Implementasi kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Telkom dalam membangun *smart city* telah terlaksana dengan baik, karena telah dapat membangun program-program yang berdaya guna, dan berkelanjutan. Serta berbagai prestasi yang telah diperoleh oleh Kota Semarang terkait inovasi pembangunan yang dilakukan. Selama berlangsungnya penyelenggaraan kerjasama tersebut tidak terdapatnya permasalahan konflik atau perselisihan antara penyelenggara kerjasama, yakni Pemerintah Kota Semarang dan PT. Telkom sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan lancar.

Dalam kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan PT. Telkom dalam membangun smart city, terdapat beberapa kendala, dalam penelitian ini peneliti menemukan Kendal-kendala dalam pelaksanaan kerjasama, yaitu:

1. *Sumberdaya*, Mindset birokrasi merupakan kendala pada pola pikir birokrat yang masih terpaku pada pola pikir lama terkait pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan dan pelayanan, pada tingkatan birokrasi, belum seluruh birokrat mahir dalam mengoperasikan teknologi dalam memberikan pelayanan, serta sadar akan manfaat pelayanan melalui pemanfaatan teknologi. Sehingga masih terdapat keengganan birokrat untuk melayani masyarakat dengan metode pemanfaatan teknologi, permasalahan yang dapat timbul akibat pola pikir lama yang masih belum berubah adalah penggunaan program-program pelayanan yang telah dibangun tidak akan terselenggara dengan maksimal, sebab birokrat sebagai penyedia jasa tidak memahami tata cara kelola pelayanan tersebut. Pemerintah Kota Semarang perlu memberlakukan program pelatihan dan sosialisasi komputerisasi secara rutin untuk meningkatkan kemampuan birokrat terkait system berbasis teknologi, serta memberikan pengetahuan dan menanamkan pengetahuan mengenai *smart city*, agar terciptanya kesadaran birokrat untuk membangun iklim professional dalam penyelenggaraan *smart city*. Hingga iklim tersebut dapat tercipta hingga tingkat pemerintahan terendah seperti kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Anggara, Sahya, 2014, *Kebijakan Publik*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Creswell, John, 2015, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, Agus, 2012, *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Kasim, Azhar, dkk, 2015, *Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara
- Moleong, J Lexy, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda karya
- Nugroho, Riant, 2014, *Public Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Grasindo
- Osborne, David & Ted Gabler, 2008, *Mewirauahakan birokrasi : reinventing government*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo
- Sarundajang, SH, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Kata Hasta
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance : Kepemerintahan Yang Baik*, Bandung : PT Mandar Maju
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : PT Bumi Aksara

Subarsono, AG, 2012, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*,
Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Sumarto, Hetifa Sj, 2003, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, Bandung :
Yayasan Obor Indonesia

Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Jakarta : PT Buku
Kita

B. Jurnal

Agus Eka Pratama, S.T,M.T, I Putu. *Smart City Beserta Cloud Computing dan
Teknologi-Teknologi Pendukung Lainnya*, 2014, Bandung : Informatika

Central Policy Unit (CPU), *Research Report On Smart City*, 2015, The
Government Of The Hongkong Special Administrative Region

Giffinger, Rudolf, etc, 2014, *Smart City Profile*, Seventh Framework Program
Kourtit, Karima & Nijkamp, Peter, 2012 *Smart cities in the innovation age : The
European Journal of Social Science Research*, Vol 25, Routledge

L. Hao, X. Lei, Z. Yan, and Y. ChunLi, 2012, *The application and
implementation research of smart city in China*, System Science and Engineering
(ICSSE),

Muliarto, Hendro, *Konsep Smart City ; Smart Mobility*, 2015, Institut Teknologi
Bandung

Rauf, A, 2016, _____, State Islamic University of Sultan Syarif
Kasim Riau

Rochman, Achwan, & Meuthia, Ganie-Rochman, 2009, *Civic Organisations and
Governance Reform in Indonesian Cities*, Vol 37, Asian Journal of Social
Science

Wibowo, 2008, *Manajemen Kinerja*, Jakarta : Rajagrafindo Persada

C. Website

Cohen, Boyd. *What exactly a smart city?*. <http://www.boydcohen.com/smartcities.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2017

<http://tabloidsimpang5.com/wujudkan-semarang-kota-smart-city/> diakses pada tanggal 25 Maret 2017